

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input checked="" type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>																													
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input checked="" type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM																												
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HALAMAN : 7											TAHUN 2006																			

Ternyata Limbah Petambangan Juga Bisa Bermanfaat

Tantangan terbesar yang dihadapi sebagian besar industri tambang di seluruh dunia yakni menyangkut pengolahan dan penempatan limbah tambang. Penanganan limbah tambang atau *tailing* dengan pemilihan sistem penempatan yang andal pun tetap menjadi isu sensitif dan menjadi sorotan masyarakat.

Namun, dewasa ini para pengelola tambang dalam membuang *tailing* peduli pada upaya perlindungan lingkungan termasuk memelihara keanekaragaman hayati. Peralihan pemilihan sistem penempatan limbah bukan saja memikirkan faktor biaya tapi dampaknya bagi lingkungan hidup. Praktik terbaik pengelolaan lingkungan di pertambangan menuntut proses yang terus menerus dan terpadu, mulai kegiatan eksplorasi awal hingga kepada konstruksi, pengoperasian dan penutupannya.

Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Irwandy Arif mengatakan bahwa pertimbangan utama dalam pemilihan sistem penempatan *tailing* haruslah tentang dampaknya terhadap lingkungan hidup, dan bukan pada biaya

ya sistemnya. "Kombinasi antara perusahaan pertambangan yang bertanggungjawab, ilmuwan yang jujur, dan masyarakat yang objektif niscaya mampu memberikan solusi yang masuk akal dan mengakomodasi berbagai kebutuhan para pemangku kepentingan," kata Irwandy.

Pakar dari UI Asis Djajadiningrat mengungkapkan, sesungguhnya ada dua metode yakni penempatan di darat (*land dam*) dan di laut (*submarine tailing disposal /STD*). Masing-masing sistem ini mempunyai plus minus dan kompleksitas masalah yang harus dikaji. Namun, pada dasarnya dari pengalaman empiris, baik STD maupun *land dam tailing* telah dilakukan dengan baik dan terbukti aman di banyak operasi pertambangan di seluruh dunia.

"Faktor yang harus diperhatikan untuk mengolah penempatan *tailing* adalah karakteristik, stabilitas waduk *tailing*, antisipasi potensi rembesan dan polusi air bawah tanah, antisipasi polusi air permukaan dan polusi udara, perlindungan biodiversitas, dampak visual, reklamasi dan restorasi," paparnya.

Menurut dia, penyimpanan limbah ini pun mendatangkan tanta-

ngan desain engineering tersendiri bagi perusahaan tambang. "Limbah dan *tailing* dapat menjadi material bermanfaat jika dibuang dan ditempatkan dengan cara yang direncanakan dengan baik secara lingkungan, keselamatan kerja, dan perhitungan keekonomian," ujar Irwandy.

Guna menghindari dampaknya terhadap alam sebenarnya telah dilakukan dengan menerapkan sejumlah ketentuan yang wajib dipenuhi setiap penanggungjawab usaha pertambangan di tanah air dengan tolok ukur yang jelas. Di antaranya parameter lingkungan di laut tempat penempatan *tailing*, harus memenuhi baku mutu lingkungan yang berlaku di Indonesia yang ditetapkan melalui Kepmen LH 51/2004.

Pemanfaatan Tailing

Tak banyak yang tahu, ternyata *tailing* juga bisa dimanfaatkan. Pada sebagian besar tambang batu bara, limbah ini digunakan untuk penutupan kembali lubang bekas tambang. Mengingat volumenya yang besar, sejak lama telah muncul pemikiran untuk memberdayakannya agar mempunyai nilai ekonomi

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : T.6

TAHUN 2006

Surat Dirjen bertentangan dengan UU Pertambangan

Oleh BAMBANG DWI DJANUARTO
Bisnis Indonesia

JAKARTA: Dirjen Mineral, Batubara dan Panas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Simon Felix Sembiring diketahui terlibat dalam proses penampungan timah inkonvensional oleh PT Koba Tin yang dinilai Kapolri melanggar hukum.

Simon diketahui memberikan izin kepada PT Koba Tin yang 75% sahamnya dimiliki oleh Malaysia Smelting Company (SMC) untuk menampung timah dari tambang inkonvensional pada 2005 setelah ada Tim Hasil Verifikasi Produksi.

Pemberian izin itu tertuang dalam Surat Dirjen Mineral, Batubara dan Panas Bumi Departemen ESDM No. 1917/40.00/DJG/2005 tanggal 17 Oktober 2005 perihal Persetujuan Penambahan Produksi dari Tambang Skala Kecil 2005.

Simon memberikan persetujuan penambahan produksi Koba Tin pada tahun lalu itu dari 15.500 ton menjadi 21.600 ton dengan menampung timah dari sub-kontraktor penam-

bangkan skala kecil (inkonvensional) berdasarkan Perjanjian Imbal Jasa (PLJ).

Kapolri Jenderal Sutanto dalam surat No. B/2587/XI/2006 menegaskan kebijakan pemerintah yang membolehkan Koba Tin menerima hasil penambangan tambang inkonvensional di wilayah Kontrak Karyanya itu bertentangan dengan UU No. 11/1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan dan Kontrak Karya PT Koba Tin.

Wilayah kontrak

Persetujuan diberikan Simon kepada Koba Tin dengan syarat subkontraktor PLJ yang memproduksi timah tersebut harus berlokasi di dalam wilayah Kontrak Karya Koba Tin.

Kemudian, Koba Tin diwajibkan membayar royalti timah yang berasal dari subkontraktor penambangan skala kecil tersebut sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam Kontrak Karya Koba Tin.

Koba Tin juga bertanggung jawab merehabilitasi dampak atau kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat kegiatan

subkontraktor PLJ.

Ketika dikonfirmasi tentang hal itu, Simon menegaskan Koba Tin memang memiliki kapasitas lebih untuk peningkatan produksi.

"Mereka memang memiliki kapasitas untuk penambahan produksi," ujarnya.

Namun, setelah terjadi kerusuhan di Bangka Belitung pada Oktober lalu, izin dari Simon dibatalkan bawahannya.

Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara Ditjen Mineral, Batubara dan Panas Bumi Mangantar S. Marpaung menerbitkan surat yang melarang Koba Tin menampung timah dari tambang inkonvensional.

Dalam surat No. 2050/40/BPP/2006 yang ditujukan kepada Direksi Kobatin, ditegaskan larangan menampung timah dari tambang inkonvensional.

Kapolri pada 15 November 2006 telah mengeluarkan surat yang mendesak pemerintah agar memutus Kontrak Karya dengan PT Koba Tin karena perusahaan asal Malaysia tersebut dianggap sebagai dalang kerusuhan di Bangka Belitung.

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV **DES**
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 **19** 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : T.C

TAHUN 2006

'Bisnis batu bara PTBA berpotensi terganggu'

Oleh ISMAIL FAHMI
Bisnis Indonesia

JAKARTA: Bisnis batu bara PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk (PTBA) berpotensi terganggu, menyusul dikosongkannya jabatan direksi BUMN itu selama dua bulan.

Keputusan Menneq BUMN Sugiharto mengosongkan jabatan direksi PTBA dan menyerahkan jabatan tersebut dirangkap oleh Komisaris Utama, menurut Ketua Masyarakat Pertambangan Indonesia (MPI) Herman Affif Kusumo, merupakan keputusan keliru yang tidak mempertimbangkan kepentingan bisnis.

"PTBA sekarang sudah menjadi perusahaan internasional. Jadi banyak bisnis batu bara yang harus diputuskan oleh direksi. Kalau ditangani komut, saya yakin dia tidak menguasai seluk-beluk bisnis, sehingga bisa mengganggu jalannya usaha," ujarnya di Jakarta, kemarin.

Ketua BUMN Watch Naldy Nazar Haroen juga menyatakan hal senada. Menurut dia, tugas komut adalah mengawasi kinerja direksi.

"Kalau komut juga memikul tugas dan tanggung jawab direksi, lalu siapa yang mengawasi siapa? Ini kan kebijakan aneh. Bahkan kontraproduktif

dengan upaya pemerintah membangun citra Indonesia sebagai ajang investasi yang sehat," tuturnya.

Herman dan Naldy menyatakan hal itu menanggapi keputusan Menneq BUMN Sugiharto yang mengosongkan jabatan direksi PTBA dan mengizinkan dirangkap oleh komut.

Keputusan tersebut keluar dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS) PTBA yang berlangsung di Jakarta, 15 November lalu.

Penjualan batu bara & briket PTBA 2005-2006 (Rp miliar)

Penjualan	2005	2006
Ekspor	379,97	557,22
Domestik	939,42	901,19

Sumber: PTBA & sumber lain

Deputi Kantor Menneq BUMN bidang Pertambangan, Industri Strategis, Energi, dan Telekomunikasi Roes Aryawijaya menyatakan keputusan ini diambil karena belum ditemukan calon direksi PTBA yang memenuhi persyaratan.

"Perangkapan jabatan direksi PTBA oleh komut berlaku dua bulan [sejak RUPS] sampai didapat direksi baru melalui *fit and proper test*."

Sudah terjadwal

Keputusan Menneq BUMN tersebut, menurut Ketua MPI, merupakan bentuk ketidakpercayaan diri dari Sugiharto dan para deputinya karena jadwal pergantian direksi PTBA sebenarnya sudah terjadwal jauh hari. "Di sini kelihatan bahwa Menneq BUMN penuh keraguan dalam mengambil keputusan."

Padahal, lanjut Herman, penugasan pemerintah kepada PTBA agar memanfaatkan momentum lonjakan harga batu bara bagi peningkatan pendapatan negara, membutuhkan penanganan serius pada level direksi.

Naldy malah menilai pertimbangan belum ditemukannya calon direksi PTBA yang memenuhi persyaratan merupakan alasan akal-akalan.

"Masak dari 200 juta lebih penduduk Indonesia, tak bisa ditemukan calon direksi yang memenuhi syarat. Di tiap BUMN kan ada pengaderan. Saya melihat banyak kader yang pantas jadi direksi PTBA," tegasnya.